



Membangun Ketahanan Pangan di Kaltim

HAJATAN Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (Penas KTNA) ke-13 menjadi momentum penting bagi Pemerintah Daerah Kalimantan Timur (Kaltim) guna mendorong ketahanan pangan daerah yang berorientasi pada produksi dan kesejahteraan petani dan nelayan. Inilah inferensi penting yang perlu digarisbawahi dari Penas KTNA yang berlangsung pada medio Juni 2011 yang lalu di kota Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim.

“Penas KTNA ini sangat penting karena kita ingin berusaha mencapai target, yakni tercapainya swasembada pangan, peningkatan hasil produksi berkelanjutan serta yang paling penting adalah mewujudkan kesejahteraan petani”, demikian penegasan Wapres Budiono peresmian Penas KTNA ke-13. Pesan yang sama juga disampaikan oleh Awang Faroek Ishak, Gubernur Kaltim, bahwa Kaltim siap mengamankan program ketahanan pangan nasional. Kesiapan Kaltim ini didukung dengan langkah-langkah pemerintah daerah dalam mendorong ketahanan pangan ini, antara lain menambah luasan lahan pertanian. “Ke depan kita akan menghadapi berbagai masalah. Persaingan di pasar global dan ancaman pemanasan global. Untuk itu sektor pertanian harus didukung dengan ketersediaan lahan yang luas dan secara khusus, kami meminta RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) Kaltim segera diterbitkan,” katanya.

Semangat Gubernur Kaltim untuk mencapai ketahanan pangan daerah patut diapresiasi. Apalagi, hal ini *in-line* dengan visi Kaltim “Mewujudkan Kaltim sebagai pusat agroindustri dan energi terkemuka menuju masyarakat adil dan sejahtera. Untuk mencapai visi sebagai pusat agroindustri tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim menetapkan misi : Melaksanakan revitalisasi pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat petani, nelayan dan peternak. Bahkan, Pemerintah Provinsi juga telah menempatkan ketahanan pangan sebagai agenda prioritas pemerintah daerah, sekalipun sebagai prioritas kedelapan. Tantangan kedepannya adalah bagaimana mencapai ketahanan pangan di provinsi Kaltim sebagaimana spirit yang muncul dalam Penas KTNA ke-13? Apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan?

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, ketahanan pangan diartikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Sebagai upaya untuk mencapai ketahanan pangan tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 tahun 2002



tentang Ketahanan Pangan, yang menyatakan bahwa penyediaan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga yang terus berkembang dari waktu ke waktu melalui : (a) pengembangan sistem produksi pangan yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya local; (b) pengembangan efisiensi sistem usaha pangan; (c) pengembangan teknologi produksi pangan, (d) pengembangan sarana dan prasarana produksi pangan, dan (e) mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif.

Operasionalisasi pelaksanaan PP No. 68 Tahun 2002 tersebut pada hakekatnya adalah pemberdayaan masyarakat, yang berarti meningkatkan kemandirian dan kapasitas masyarakat yang berperan aktif dalam mewujudkan penyediaan, distribusi, dan konsumsi pangan dari waktu ke waktu dengan memanfaatkan kelembagaan social ekonomi yang telah ada dan dapat dikembangkan di tingkat perdesaan dengan focus utamanya adalah rumahtangga perdesaan.

Menempatkan Kaltim sebagai provinsi dengan target ketahanan pangan tentu bukan hal yang mudah. Apalagi, terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau, belum menjadi prioritas utama Kaltim. Revitalisasi sektor pertanian seharusnya diarahkan pada bagaimana pengembangan sistem produksi pangan yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal. Selain itu, pengembangan

efisiensi sistem usaha pangan diharapkan mampu mendongkrak investasi disektor pertanian ini. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah mendorong pengembangan sarana dan prasarana produksi pangan serta mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif.

Arah pembangunan sektor pertanian terlihat makin tidak jelas, karena pengembangan Kaltim sebagai kawasan pengembangan Energi nasional sebagaimana yang terintegrasi ke dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Bahkan jauh sebelum MP3EI, kesan Kalimantan Timur sebagai kota Tambang sudah sejak Orde Lama. Inilah yang kemudian mematikan peran sektor pertanian di Kaltim. Ketidakjelasan arah pembangunan sektor pertanian di Kaltim ini berdampak buruk terhadap pembangunan ekonomi secara keseluruhan di Kaltim.

Kontribusi sector pertanian jika dibandingkan dengan sector lainnya terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Provinsi Kalimantan Timur tergolong rendah. Kontribusi PDRB dari sektor pertanian di Kaltim hanya 5,8 persen, sementara sumbangan sector pertambangan (batu bara) saja mencapai sekitar 41,60 persen dan migas 34,8 persen.

Tentu kita tidak boleh pesimis melihat kenyataan ini. Sekalipun perannya terhadap PDRB kecil, namun penyerapan tenaga kerja, sector pertanian jauh lebih besar. Hal ini terbuka peluang untuk dikembangkannya sector pertanian di



masa-masa mendatang.

Optimisme ini bisa dilihat dari target pengembangan sector pertanian secara nasional, terutama di provinsi Kaltim, dapat dilihat dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012. Dari dokumen RKP tersebut target Nasional untuk Kalimantan Timur tergolong rendah untuk semua produk sector pertanian seperti padi jagung, kedelai, gula, daging sapi dan produk perikanan.

Untuk padi misalnya, pemerintah hanya menargetkan produksi sebanyak 668.070 ton. Angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan target produksi padi di provinsi-provinsi di pulau Kalimantan lainnya seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan, meskipun masih lebih baik jika dibandingkan dengan target produksi padi provinsi Kalimantan Tengah. Untuk produksi Jagung, Kalimantan Timur juga berada di urutan ke-3 setelah provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan yakni sebanyak 17.038 ton. Sementara itu, untuk produksi kedelai provinsi Kaltim berada di posisi kedua setelah provinsi Kalimantan Tengah yakni sebanyak 10.700 ton kedelai pada tahun 2012. Hal sama juga terjadi pada produksi daging, dimana selama tahun 2012, produksi daging ditargetkan sebanyak 7.578 ton. Dan satu-satunya yang membanggakan adalah produksi produk perikanan, dimana target produksi di Kalimantan Timur merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan tiga provinsi di Kalimantan lainnya yakni sebanyak 376.092 ton. Angka-angka produksi pertanian yang ditargetkan tersebut

menjadi sangat kecil jika dibandingkan dengan target produksi padi, jagung, kedelai, daging sapi dan perikanan secara nasional.

Keberhasilan Provinsi Kaltim menggelar Penas ke-13 di Kutai Kartanegara menjadi harapan baru bagi provinsi ini untuk mencapai target ketahanan pangan. Bagaimana Kaltim bisa mencapai target tersebut? Sederhana: jadilah desa sebagai prioritas utama sebagai lokus pencapaian target ketahanan pangan!

Mengapa ketahanan pangan dimulai dari perdesaan? Tentu alasannya tidak sekedar 60% petani kita tersebar di daerah perdesaan. Namun, lebih dari itu, kawasan pertanian berada di daerah perdesaan. Untuk itu, perwujudan ketahanan pangan nasional harus dimulai dari perdesaan sebagai basis kegiatan pertanian.

Membangun daerah perdesaan sangat penting terutama dalam penyediaan bahan pangan untuk penduduk, penyedia tenaga kerja untuk pembangunan, penyedia bahan baku untuk industri, dan penghasil komoditi untuk bahan pangan dan keperluan ekspor. Karena itu, desa menjadi *entry point* untuk masuknya berbagai program yang mendukung terwujudnya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, yang secara kumulatif akan mendukung terwujudnya ketahanan pangan di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan tingkat nasional.



Disamping itu, ada beberapa alasan penting lain kenapa desa sebagai *entry point* bagi program ketahanan pangan nasional, sebagai berikut : (a) rendahnya kemampuan masyarakat perdesaan dalam mengakses pangan sebagai akibat keterbatasan penguasaan sumberdaya alam, sehingga kurang memiliki peluang dalam mengembangkan usahanya di bidang pertanian; (b) rendahnya pendapatan masyarakat yang tinggal di daerah perdesaan sehingga angka kemiskinan structural semakin tinggi di daerah perdesaan; (c) minimnya sarana dan prasarana --pengairan, jalan desa, sarana usaha tani, air bersih, listrik dan pasar; (d) rendahnya pengetahuan petani tentang pangan beragam, bergizi dan berimbang; (e) belum optimalnya fungsi kelembagaan aparat dan masyarakat/kelompok tani; masih rendahnya akses masyarakat perdesaan terhadap lembaga permodalan dan lain sebagainya.

Pendek kata, persoalan ketahanan pangan menjadi momok menakutkan bagi sejumlah negara di dunia. Bagaimana dengan Indonesia? Aman tidaknya provinsi Kaltim sangat tergantung dari berhasil-tidaknya program ketahanan pangan daerah. Tentu, pemerintah daerah tidak bias bermain sendiri dalam mendorong program ketahanan pangan daerah Kaltim. Dibutuhkan sinergi dengan berbagai pihak antara lain dunia usaha dan masyarakat.

Pendek kata, persoalan ketahanan pangan menjadi momok menakutkan bagi sejumlah negara di

dunia. Bagaimana dengan Indonesia? Aman tidaknya provinsi Kaltim sangat tergantung dari berhasil-tidaknya program ketahanan pangan daerah. Tentu, pemerintah daerah tidak bias bermain sendiri dalam mendorong program ketahanan pangan daerah Kaltim. Dibutuhkan sinergi dengan berbagai pihak antara lain dunia usaha dan masyarakat.

Peran dunia usaha sangat penting terutama dalam mendorong ketersediaan pasar komoditas, permodalan dan bersama pemerintah melakukan public private partnership dalam menyediakan sarana dan prasarana sector pertanian di perdesaan. Hal penting lainnya dalam mendorong ketahanan pangan ini adalah penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian seperti pupuk dan ketersediaan teknologi pertanian yang memadai bagi petani.

Sementara itu, peran pemerintah lebih pada mendorong dan membuat regulasi yang mendukung makin kondusifnya iklim investasi di sector pertanian serta meningkatkan capacity building bagi petani dan nelayan dalam meningkatkan produktifitasnya. Peran pemerintah lainnya adalah menjamin tidak terjadinya fluktuasi harga sarana dan prasarana pertanian yang sangat dibutuhkan petani dalam meningkatkan produktifitas hasil pertanian. Peran pemerintah lainnya adalah mendorong lembaga-lembaga keuangan BUMN untuk terus memberikan kemudahan permodalan bagi petani. Sementara itu, peran-peran asosiasi-asosiasi petani termasuk KTNA diharapkan dapat membuka akses pasar produk-produk pertanian



seluas-luasnya kepada petani. Dengan sinergi ini diharapkan ketahanan pangan di provinsi Kalimantan Timur dapat dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan pemerintah.

Namun, sinergi tersebut tetap didukung dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang final sehingga ada kepastian hukum dalam penggunaan lahan. Kita berharap RTRW tersebut segera ditetapkan oleh Pemerintah. Semoga! (**Mariman Darto**)

